

Menggali Makna Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Analysis of the Meaning of the Exploring the Meaning of Actualization of Pancasila in Community and State Life

Clairene Gargita¹, Ario Pamungkas², Michelle Febby Maranatha³, Nanda Nabilla Dwiyani⁴, Nashwadwina Iswiani⁵, Zahra Aulia Dinata⁶

Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Universitas Esa Unggul, Bekasi

nandanabilla1601@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara berbentuk kesatuan yang menganut sistem pemerintahan republik, dengan Pancasila sebagai landasan utamanya. Pancasila dirumuskan berdasarkan ikatan primordial, sejarah perjuangan bangsa, dan semangat persatuan yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila lebih tepat dianggap sebagai landasan negara, bukan ideologi, karena menjadikannya sebagai ideologi dapat menimbulkan konflik dengan ideologi lainnya dan mengurangi sifat inklusifnya. Jika Pancasila dijadikan ideologi negara, maka akan mengurangi peranannya sebagai dasar universal bagi seluruh komponen bangsa. Ir. Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan dasar negara untuk menjaga persatuan dan mengatasi perdebatan antar kelompok. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah anugerah agar terbentuk pijakan moral dan politik di dalam keseharian bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kemampuan untuk menjaga persatuan bangsa, mencegah perpecahan, dan mengakomodasi keberagaman. Selain itu, nilai-nilai Pancasila mencerminkan kebebasan beragama, keadilan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Setiap sila saling berhubungan, menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan bernegara. Pelaksanaan Pancasila harus dilakukan secara konsisten melalui tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana, untuk mencapai keinginan dan tujuan bangsa yang selaras, seimbang, dan hidup damai. Adanya penerapan nilai-nilai Pancasila, keberagaman Indonesia dapat tetap menjadi kekuatan dalam mewujudkan bangsa yang memiliki rasa persatuan, berperilaku adil, dan hidup sejahtera.

Kata Kunci: pancasila, ideologi, nilai penerapan, kehidupan

Abstract

Indonesia is a unitary state that adheres to a republican system of government, with Pancasila serving as its primary foundation. Pancasila is formulated based on primordial ties, the nation's historical struggle, and the spirit of unity embodied in the motto Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila is more appropriately regarded as the foundation of the state rather than as an ideology, as its designation as an ideology may lead to conflicts with other ideologies and undermine its inclusive nature. Should Pancasila be designated as the state ideology, its role as a universal basis for all segments of society would be diminished. Ir. Soekarno proposed the establishment of Pancasila as the foundation of the state to preserve unity and resolve disputes among various groups. The adoption of Pancasila as the foundation of the state is a valuable gift, providing a moral and political grounding in the daily lives of the Indonesian people. As the state's foundation, Pancasila plays a critical role in preserving national unity, preventing division, and accommodating diversity. Furthermore, the values of Pancasila reflect religious freedom, justice, unity, democracy, and social justice. Each principle is interrelated, forming a robust basis for national life. The implementation of Pancasila must be carried out consistently through concrete actions, rather than mere discourse, to achieve the nation's aspirations of harmony, balance, and peaceful coexistence. By embodying the values of Pancasila, Indonesia's diversity can remain a strength in fostering a nation characterized by unity, fairness, and prosperity.

Keywords: *pancasila, ideology, application value, life*

PENDAHULUAN

Menurut kajian dari ilmu bahasa atau ilmu asal kata, kata Pancasila sendiri asalnya dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni "Panca" yaitu lima dan "Sila" yaitu suatu pedoman atau ajaran hidup masyarakat dalam berperilaku. Kata "Sila" juga memiliki kaitan dengan kata "Susila", yang artinya berperilaku baik; beradab; dan bermoral. Pancasila terdiri dari lima prinsip atau dasar suatu negara, hal ini berarti Pancasila mengandung lima pedoman atau

ajaran hidup masyarakat dalam berperilaku baik; beradab; dan bermoral.

Secara istilah, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPKI, Pancasila dirujuk oleh Ir. Soekarno untuk membahas tentang lima prinsip dasar suatu negara yang memuat di dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila dijadikan prinsip bagi negara Indonesia setelah perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka, khas, dan orisinal, meskipun nilai-

nilainya bersifat universal dan dapat ditemukan di berbagai negara. Keistimewaan Pancasila terletak pada fungsinya, yaitu dijadikan suatu dasar bagi negara dan pegangan hidup masyarakat Indonesia (Nurafifah & Dewi, 2021).

Pandangan hidup dan ideologi atau pemikiran bangsa Indonesia sudah tercantum dan berpegang teguh pada Pancasila. Sebagai pedoman hidup, kelima sila Pancasila harus menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari warga Indonesia agar berperilaku yang sesuai, khususnya kehidupan bagi bangsa dan negara. Cita-cita dan keinginan negara Indonesia wajib kita tuntaskan, oleh karenanya setiap masyarakat Indonesia diharuskan untuk mengamalkan kelima dasar Pancasila. Namun pada masa ini, masih banyak warga Indonesia yang belum memahami cara implementasi nilai-nilai Pancasila sepenuhnya, hal ini menggambarkan bahwa kurangnya penghayatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Nurafifah & Dewi, 2021).

Krisnamukti (2020) mengungkapkan bahwa Pancasila seharusnya menjadi dasar moral dan norma yang mengatur perilaku, sikap, dan tindakan seluruh bangsa Indonesia. Dengan begitu, pentingnya masyarakat Indonesia untuk paham dengan cara mengimplementasikan atau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku di keseharian aktivitas masyarakat itu sendiri. Jika hal itu dapat dituntaskan, maka tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengupas

dan menjelaskan tentang makna Pancasila dan bagaimana cara menerapkannya dalam keseharian hidup di lingkup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

TEORI

Beberapa Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli, Tokoh Sejarah, dan Sumber yang Ditemui

1. Ir. Soekarno

Ir. Soekarno yang biasanya dikenal sebagai Bapak Proklamasi karena merupakan Pahlawan Proklamasi Republik Indonesia. Beliau yang memberikan pandangan mendalam tentang Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila adalah arti dari filsafat dan pandangan hidup terhadap bangsa Indonesia dari lima prinsip, yaitu suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan, kedaulatan rakyat yang diatur oleh kebijaksanaan, dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau juga mengungkapkan bahwa selain menjadi dasar negara, Pancasila juga menjadi panduan etika yang dijalani di kehidupan sehari-hari.

2. Ali Sastroamidjojo

Beliau memberikan penjelasan yang lebih fokus tentang dimensi politik Pancasila. Menurutnya, sumber hukum utama di Indonesia yaitu Pancasila yang juga menjadi pijakan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Beliau beranggapan bahwa Pancasila bersifat dinamis atau adaptif.

3. Notonegoro

Beliau mengatakan bahwa sumbu pemikiran dan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang berfungsi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Selain itu, sebagai benteng perlindungan pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

4. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Beliau mempunyai pemikiran mengenai Pancasila dari pandangan historis. Menurutnya, Pancasila adalah perpaduan antara nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep perjuangan nasional yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Beliau juga menafsirkan Pancasila sebagai ideologi yang mencakup jati diri dan karakteristik bangsa Indonesia.

5. Ruslan Abdul Gani

Beliau mengatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi negara sebagai ideologi bersama dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia. (Pasla, 2024)

6. Florensia Silaban dan Yakobus Ndona (2024)

Para pendiri bangsa bersepakat dalam bidang politik, bahwa Pancasila didefinisikan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila juga sering dipandang sebagai ideologi yang berada di posisi tengah antara dua ideologi besar dunia, yakni komunisme dan kapitalisme. Pancasila juga tidak menganut individualisme atau kolektivisme.

Implementasi isi Pancasila dalam keseharian hidup masyarakat berarti menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam norma yang dapat diterapkan. Nilai-nilai ini berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri dan mencakup tujuh aspek penting dalam kehidupan spiritual, seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, keindahan, dan *religiusitas*. Keseluruhan nilai ini mencerminkan kepribadian serta karakter bangsa Indonesia (Silaban & Ndona, 2024).

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Sila-sila yang terkandung di dalamnya memberikan arahan hidup yang harus dipegang dengan kuat oleh masyarakat, bangsa, dan negara..

Menurut Notonegoro (2008), Pancasila bukan hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai sumber nilai dan moral yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Menurut Soekarno (1981), Pancasila adalah pedoman hidup agar bangsa Indonesia yang beragam dapat bersatu, walaupun berbeda suku; agama; ras; budaya; bahasa; dan adat istiadat; serta menuntun negara agar mensejahterakan dan lebih bersikap adil kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pentingnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan menciptakan rasa saling menghormati antar individu. Hal ini sejalan dengan pandangan Suyanto (2009) yang menyatakan bahwa dengan menerapkan isi kandungan Pancasila dalam keseharian hidup masyarakat justru mampu menguatkan rasa solidaritas sesama dan kerukunan antar warga. Praktik kerja sama di lingkungan rumah merupakan bukti aktualisasi nilai-nilai Pancasila, yang menggambarkan semangat solidaritas dan kebersamaan pada sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila. Di sisi lain, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat merupakan penghormatan terhadap pluralitas sosial atau sikap saling menghormati keberagaman dalam berinteraksi yang terjadi pada antar individu maupun antar kelompok, baik dalam hal agama, suku, maupun budaya. Menurut Rahardjo (2010), sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan merupakan bagian yang termasuk dari penerapan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengajarkan agar umat manusia bersanding dalam kehidupan dengan rukun dan saling menghormati satu sama lain.

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Dalam kehidupan berbangsa, aktualisasi nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara (2007) yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman ini dapat disatukan oleh alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Aktualisasi sila ketiga, "Persatuan Indonesia", dapat dilihat dari upaya menjaga persatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan budaya, etnis, dan agama.

Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga mencakup penguatan demokrasi dan keadilan sosial, seperti yang tercantum dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Menurut Alamsyah (2015), musyawarah untuk mufakat dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi merupakan wujud dari aktualisasi nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam hal itu dapat dibuktikan bahwasannya demokrasi Indonesia berfokus pada pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Berikut unsur demokrasi yang dikemukakan oleh para Ahli.

1) Sargent dan Lyman Tower (1987) mengatakan bahwa unsur-unsur demokrasi mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, adanya kesetaraan hak di antara sesama manusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada setiap warga negara, pelaksanaan sistem perwakilan, serta penerapan sistem pemilihan yang didasarkan pada prinsip mayoritas.

2) Afan Gaffar (1999) mengatakan bahwa unsur-unsur utama demokrasi mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan kekuasaan, pergantian kekuasaan secara teratur, proses rekrutmen politik yang transparan, pelaksanaan pemilihan umum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar.

3) Menurut Marriam Budiardjo (1977), terdapat elemen-elemen penting dalam demokrasi, yang meliputi pembentukan berbagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Lembaga-lembaga ini antara lain mencakup pemerintahan yang akuntabel, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), organisasi politik, media massa, serta sistem peradilan yang independen.

4) Franz Magnis Suseno (1997), mengemukakan terdapat lima ciri utama yang menjadi inti dari sebuah negara demokrasi. Ciri-ciri tersebut meliputi:

- (1) Penerapan prinsip negara hukum,
- (2) Pemerintahan yang terletak di bawah pengawasan efektif warga negara,
- (3) Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil,
- (4) Penerapan prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan, serta
- (5) Adanya perlindungan yang kuat terhadap hak - hak demokratis. (detik.com 2024)

Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara bertujuan untuk memastikan Indonesia dapat mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam

pembukaan UUD 1945, di antaranya mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, peningkatan kesejahteraan bersama, pencerdasan bangsa.

Menurut Hamka (2009) menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara tercermin dalam kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat dan fokus mengamati kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan merupakan penerapan dari aktualisasi sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Selain itu, penerapan prinsip musyawarah pada pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara menunjukkan aktualisasi sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan".

Pendidikan Pancasila sebagai Sarana Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila

Pendidikan Pancasila memegang peranan penting dalam proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Nata (2010), pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengajarkan teori tentang nilai-nilai Pancasila dan mendorong peserta didik agar dapat menerapkannya di keseharian hidup masyarakat. Hal ini sepemikiran dengan konsep karakter dalam pendidikan, yang memiliki tujuan untuk menyatukan dan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pembelajaran Pancasila untuk menjadikan pribadi seseorang yang memiliki budi pekerti luhur,

berwawasan kebangsaan, dan bertanggung jawab terhadap negara.

Berdasarkan teori-teori pemikiran di atas, karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk menganalisis makna aktualisasi nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penulis berpendapat bahwa paham-paham atau pemikiran yang menyangkut Pancasila, akan mendorong individu untuk menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam keseharian hidup masyarakat. Hal ini diyakini dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, memperkuat persatuan bangsa, dan mewujudkan negara yang berkeadilan sosial.

Moerdiono (1995 / 1996) menyatakan bahwa terdapat tiga tingkatan nilai dalam ideologi Pancasila, yaitu :

1. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah konsep nilai yang bersifat abstrak, tetap, umum dan tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat. Nilai ini mengandung kebenaran yang bersifat universal atau menyeluruh, seperti aksioma. Dari segi yang terkandung di dalamnya, nilai dasar berisi cita-cita, tujuan, tatanan dasar, serta karakteristik yang dimilikinya. Dalam konteks Pancasila, nilai dasar ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut lahir dari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah dari penderitaan yang bangsa Indonesia alami, sekaligus dari cita-cita yang berasal dari ajaran agama dan tradisi mengenai masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila mencerminkan semangat

kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia.

2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental ialah konsep nilai yang memiliki hubungan dengan konteks serta merupakan pemaparan dari nilai dasar. Nilai ini berfungsi sebagai panduan kinerja untuk periode dan pada saat tertentu. Pada masa ke masa nilai instrumental ditentukan dengan perubahan zaman. Namun, tetap berlandaskan pada nilai dasar yang mendasarinya. Penjelasan nilai ini dapat dilakukan secara dinamis serta kreatif, dengan menghadirkan banyak bentuk terbaru yang tetap mencerminkan semangat yang satu, sesuai batasan yang ditetapkan oleh nilai dasar tersebut.

Dari segi nilai yang terkandung di dalamnya nilai instrumental meliputi organisasi kebijakan strategi, rencana, sistem, program, hingga banyak proyek yang bertujuan untuk mengimplementasikan nilai dasar. Penyusunan nilai instrumental ini menjadi kewenangan lembaga negara, seperti MPR; Presiden; dan DPR. Nilai ini berfungsi sebagai panduan kinerja untuk periode dan beberapa kondisi, seperti nilai instrumental yang harus disesuaikan dengan zaman dari masa ke masa. Namun, tetap berlandaskan nilai dasar. Pemberian nilai ini diterapkan melalui metode yang kreatif, serta dinamis, dengan menghadirkan beberapa bentuk baru yang tetap mencerminkan rasa semangat, sesuai batasan ditetapkan dari nilai dasar tersebut. segi nilai yang terkandung di dalamnya, nilai instrumental meliputi kebijakan yaitu strategi, organisasi, sistem, rencana, program, sampai kepada proyek bertujuan

untuk mengimplementasikan pada nilai dasar. Penyusunan pada nilai instrumental akan menjadi kewenangan lembaga negara.

3. Nilai Praksis

Nilai praktis atau nilai instrumental adalah konsep nilai yang berada di keseharian hidup masyarakat, yaitu dengan cara bagaimana rakyat menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai pada Pancasila. Penerapan nilai praksis dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Contoh penerapan tertulis yaitu pada norma-norma atau aturan-aturan tertulis; artikel opini yang membahas tentang nilai keadilan dalam mengatasi ketimpangan sosial; esai pendidikan yang berisi contoh bagaimana perilaku jujur dapat berguna di masa depan dan mendukung keberhasilan jangka panjang; kode etik perusahaan yang menjadi pedoman karyawan dalam bersikap di perusahaan; serta laporan kegiatan sosial yang berisi bagaimana nilai-nilai luhur dapat diterapkan secara nyata melalui media tulisan. Sedangkan secara tidak tertulis, penerapannya yaitu berupa aksi nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok di kehidupan sehari-hari. Dari segi yang terkandung di dalamnya, nilai praksis adalah arena di mana idealisme dan realitas saling berhadapan dan berjuang untuk menemukan keseimbangan.

Konsep penting dari ideologi yaitu adanya bukti nyata penerapannya maupun aktualisasinya dalam kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pada konsep ideologi memiliki rumusan yang baik dan juga ulasan yang masuk akal, dan konsisten dalam nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Di sisi lain, nilai

praksis tidak bisa diaktualisasikan. jadi, ideologi akan kehilangan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang. Bahkan, Moerdiono (1995 / 1996) memberitahu kalau masalah yang paling rumit untuk sebuah ideologi ialah menjaga keselarasan antara nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis agar ketiganya bisa ditegakkan dengan baik, maka ideologi itu tidak akan mempunyai masalah. Konflik baru muncul jika terdapat ketidaksesuaian di tiga tingkatan nilai-nilai itu. Driyarkara menyatakan bahwa proses pelaksanaan ideologi Pancasila lebih baik dilaksanakan dengan gerakan transformasi pada Pancasila, yaitu teori yang menjadi norma-norma dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan yang mengikuti zaman dengan menggunakan pendekatan teori dari Aristoteles yang menyatakan kalau di dalam diri Pancasila yang didasari kenyataan atau fakta berisi potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamis), yang berarti kemampuan Pancasila yang dapat berubah.

(Ein, et al 2023)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan mengenai Aktualisasi Pancasila menggunakan studi kepustakaan dengan mereview artikel yang berbentuk jurnal ilmiah yang membahas mengenai Aktualisasi Pancasila.

PEMBAHASAN

Pancasila sudah menjadi landasan dan sebagai pedoman untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar terbentuknya bangsa ini didasarkan pada berbagai faktor, antara lain ikatan asli antar suku dan daerah, sejarah perjuangan bangsa, serta semangat persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Abdurrahman Wahid, Pancasila bukanlah ideologi nasional melainkan landasan suatu bangsa. Pancasila memuat asas aturan hidup bernegara, sedangkan falsafah hanya berupa deretan prinsip ilmu pengetahuan. Ia juga menekankan bahwa menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara berpotensi menciptakan tumpang tindih dengan aspek kehidupan lain, termasuk agama. Jika Pancasila sebagai landasan negara dapat memiliki hubungan dengan aspek kehidupan lainnya, termasuk agama. Menafsirkan Pancasila sebagai ideologi, sebagaimana yang dilakukan pada masa Orde Baru, berpotensi menimbulkan konflik dengan ideologi lain seperti komunisme, sosialisme, dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Arbi Sanit, yang berargumen bahwa menjadikan Pancasila sebagai ideologi justru akan mengurangi sifat inklusifnya, menjadikannya lebih eksklusif.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Ir. Soekarno, salah satu tokoh utama pendiri bangsa, mengusulkan Pancasila sebagai ideologi dan landasan negara. Usulan ini dianggap sebagai solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak sekaligus menjaga persatuan bangsa. Di satu sisi, setelah berabad-abad kolonialisme,

rencana kemerdekaan terasa semakin dekat, namun di lain hal, perdebatan mengenai landasan negara membahayakan persatuan nasional.

Anugerah besar bagi Indonesia adalah ketika Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Komarudin Hidayat menekankan agar bangsa Indonesia secara moral dan politik menghormati dan mengedepankan visi para pendirinya. Pancasila terbukti menjadi landasan yang menjaga persatuan, mencegah perpecahan, serta menjamin keadilan sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan dalam perjalanan perjalanan bangsa.

Sebagai landasan dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan landasan yang mewakili suatu bangsa dengan beragam latar belakang suku, agama, budaya, bahasa dan lainnya. Pedoman yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat umum dan fundamental, dan sah untuk semua warga negara Indonesia. Akibatnya, sangat krusial untuk mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dengan tekad yang kuat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jika kita ingin mewujudkan cita - cita para founding fathers kita dalam membangun fondasi bangsa, pengalaman ini harus diungkapkan dalam bentuk tindakan.

Masing-masing nilai tersebut mempunyai makna yang dalam dan saling berhubungan untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

a) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Kami menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mengakui bahwa segala

nilai kehidupan bermula dari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Perintah ini menekankan pentingnya kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan setiap orang. Kebijakan nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan ketuhanan yang tinggi yang berfungsi sebagai landasan pemerintahan.

b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menanamkan kesadaran akan pentingnya bersikap adil dan menghormati martabat orang lain. Penghormatan terhadap hak asasi manusia didasarkan pada prinsip ini, yang menuntut perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Dalam kebijakan nasional, keadilan sosial harus diimplementasikan guna menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan peluang yang setara dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.

c) Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda, penting untuk mempertahankan persatuan. Semangat persatuan adalah dasar untuk perdamaian dalam keberagaman. Kehidupan yang harmonis dan damai dimungkinkan oleh persatuan yang kuat, yang juga memperkuat daya tawar negara Indonesia di kancah internasional.

d) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menggambarkan dasar demokrasi, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Prinsip ini menuntut agar semua keputusan dalam negara didasarkan pada kebijaksanaan dan proses perwakilan yang adil. Melindungi kebaikan bersama membutuhkan pemimpin bijak yang mendengarkan rakyatnya dan membuat keputusan hati-hati.

e) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengharuskan supaya semua golongan masyarakat diperlakukan secara adil dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip ini mengharuskan negara memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan.

KESIMPULAN

Pancasila yang merupakan prinsip dan dasar negara Indonesia memegang posisi yang sangat esensial dalam mempersatukan negara Indonesia dari banyaknya latar belakang yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi landasan filosofis dan arahan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam dan saling terkait untuk menciptakan keharmonisan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Pancasila mengajarkan warga negara Indonesia tentang prinsip-prinsip Pancasila yang sifatnya menyeluruh dan mampu diterapkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pengamalan yang terkandung dalam Pancasila, yaitu secara konsisten;

penuh komitmen; dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk mencapai cita-cita para tokoh nasional Indonesia yang terdahulu.

Dengan adanya Pancasila di kehidupan masyarakat, Indonesia dapat menjaga persatuan dalam keberagaman; mencegah perpecahan; dan menjaga perilaku agar tidak ada individu atau kelompok yang tersinggung dan merasa dirugikan. Pada intinya, Pancasila itu sangat penting dan wajib ada di diri setiap individu, sehingga individu tersebut menjalankan dan mengamalkan isi Pancasila dengan baik atau tidak melenceng.

REFERENSI

- Ein, M. N. G. M. N. E., Ridho, R. A., Lathifatunnabila, R., Suliyono, R. M., & Puspita, A. M. I. (2023). Aktualisasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(7), 81-90. Dapat diakses pada link: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1041>
- Nurafifah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai - nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(12), 99. doi: <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.227>
- Pasla, B. N. (2024, November 05). Pengertian pancasila menurut para ahli dan tokoh sejarah. *Pemrov Jambi*. Dapat diakses pada link: <https://pasla.jambiprov.go.id/pengertian-pancasila-menurut-para-ahli-dan-tokoh-sejarah/>
- Prasetyono, W. (2023). Implementasi demokrasi berdasarkan pancasila. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 6(1), 29–33. doi: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v6i1.64>
- Rahma, A. N. ., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari - hari. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63-74. Dapat diakses pada link: <https://jurnalfkipuntad.com/index.php/jurpis/article/view/1089>
- Silaban, F., & Ndonga, Y. (2024). Aktualisasi nilai - nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. *Jurnal Istiqomah*, 1(4), 118-121. doi: <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1417>